

IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM 2024 DI PERUMDA TUGU TIRTA KOTA MALANG

Farida Rahmawati¹, Diana Fitriani², Chatryne Marthadivea Valentiara Gusti³, Christabel Owena Yanuar⁴

Universitas Negeri Malang

Correspondent author: farida.rahmawati.fe@um.ac.id

Kota Malang, 65145, Indonesia

Abstract

This study aims to find out how the process of implementing the drinking water grant program is and to analyze the success factors and obstacles in overcoming the availability of drinking water for Low-Income Communities (MBR). In this study, researchers used descriptive research with a qualitative approach. Primary and secondary data sources. Then the data were analyzed interactively in the opinion of Miles Huberman and Saldana (2014). The results of the research show that the implementation of this program starts in 2021 until 2023. As of February 27, 2023, 1,083 SRs have been installed and according to the commitment of Perumda Air Drinking Tugu Tirta Malang City will install all house connections that have already paid a new installation fee. Suggestions from researchers to Perumda Drinking Water Tugu Tirta Malang City so that the obstacles encountered in the process of working on this program for the community can be reviewed and used as evaluation material so that in the future service to the community can be better.

Keywords: *Drinking Water Hibah Program; Local water company; Low-Income Communities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program hibah air minum serta menganalisis faktor keberhasilan dan kendala dalam mengatasi ketersediaan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Kemudian data dianalisis secara interaktif menurut pendapat miles Huberman dan saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program ini dimulai pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 sudah terpasang sebanyak 1.083 SR dan sesuai komitmen Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang akan memasang semua sambungan rumah yang sudah membayar biaya pasang baru. Saran dari peneliti kepada Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang agar kendala yang dihadapi dalam proses pengerjaan program ini kepada masyarakat dapat ditinjau ulang dan dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin baik.

Kata Kunci: *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); Perusahaan Daerah Air Minum; Program Hibah Air Minum*

PENDAHULUAN

Akses air bersih adalah salah satu kebutuhan manusia di manapun. Di Indonesia, masyarakat bisa mendapatkan air bersih dengan menggali sumur sendiri atau melalui layanan air. Pemerintah menyediakan layanan penyaluran air bersih lewat perusahaan air minum yang dinaungi oleh Pemda. Di Kota Malang, layanan distribusi air bersih diserahkan kepada Perumda Air Minum Tugu Tirta. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Malang, area pelayanan Perumda Tugu Tirta mencakup keseluruhan luas wilayah Kota Malang. Artinya, PDAM Kota Malang memiliki area pelayanan seluas 145,28 km². Jumlah pelanggan mencapai lebih dari 175 ribu rumah tangga. Jumlah ini dilayani dengan produksi air yang mencapai hampir 1.500 liter/detik.

Dengan tujuan guna mencapai akses 100% air minum yang aman pada tahun 2024, Program Hibah Air Minum yang mencakup dua program, diantaranya Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Program Hibah Air Minum Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai Program Hibah Air Minum dengan menggunakan pendanaan APBN. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pencapaian sasaran mencapai 100-0-100 pada pembangunan sektor keciptakaryaan, merupakan pencapaian tujuan akses 100% air minum yang aman, 0% kawasan yang kumuh, dan 100% sanitasi yang layak dan pantas direncanakan oleh Pemerintah. Dilihat dari data BPS yang ada, sampai 2014 keadaan akses air minum yang sudah dapat dipenuhi di seluruh Indonesia telah mencapai 72,55%. Disisi lain, untuk keadaan akses sanitasi yang layak sudah dapat dipenuhi Indonesia menyentuh 62,14%.

Perumda Air Minum Tugu Tirta melangsungkan program hibah air minum perkotaan. Program tersebut dikemas dalam "Tugu Tirta Peduli" yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada program itu, Pemerintah Daerah diberikan hibah oleh pemerintah pusat melalui pendekatan kinerja yang terukur, dalam hal tersebut Pemda diharuskan untuk meningkatkan akses air minum layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berada di perkotaan, dimana dana yang dikeluarkan akan ditanggung sementara oleh penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, kemudian dana hibah akan dicairkan dari pemerintah pusat untuk Pemda apabila disetujui kementerian teknis telah dilaksanakan.

"Tugu Tirta Peduli" merupakan program pasang baru murah bagi calon pelanggan yang tergolong dalam MBR. dengan tarif hanya sebesar Rp.550.000,00,- dari tarif sebenarnya yaitu sebesar Rp.1.861.000,00,-, selain mendapatkan harga yang berbeda, calon pelanggan MBR dapat mengangsur biaya pengajuan pasang baru sebanyak maksimal tiga kali dan mendapatkan gratis biaya tambahan jaringan maksimal 30 meter. Proses pendaftaran dan

verifikasi dilakukan pada tahun 2021 sedangkan untuk pemasangan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2022 sampai dengan 2023.

Berdasarkan latar belakang program yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap dilaksanakannya program hibah air minum 2024 yang dilaksanakan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, serta hal-hal menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan-laporan yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Program Hibah Air Minum 2024 pada Perumda Air Minum Tugu Tirta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Tugu Tirta Peduli dilaksanakan dalam kurun waktu pertengahan 2021 untuk verifikasi sedangkan untuk pemasangan dilakukan mulai tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023. Sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 yang sudah terpasang sebanyak 1.083 SR dan sesuai dengan dedikasi Perumda Air Minum Tugu Tirta akan memasang semua sambungan rumah yang sudah membayar biaya pasang baru meskipun Program Hibah Air Minum TA 2022 sudah selesai.

Tahapan Pelaksanaan Program Hibah

Pengenalan dan penyebaran informasi mengenai usulan program hibah yang ditujukan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota jika tertarik untuk turut serta dalam program ini

harus mengirimkan surat yang menyatakan minat & komitmen mereka demi memenuhi kriteria & prasyarat penerimaan hibah ke Dirjen Cipta Karya. Dokumen tersebut juga harus dilampiri dengan bukti kesiapan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

CPMU melakukan evaluasi terhadap dokumen usulan dan tingkat kesiapan kegiatan yang diajukan oleh setiap pemerintah daerah yang mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku.

Pengusulan daftar kabupaten atau kota yang berpotensi menerima hibah kepada Kemenkeu lewat DJPK oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang mewakili Menteri PU & Perumahan Rakyat. Kemenkeu lewat DJPK mengeluarkan SPPH & PHD, lalu Menteri Keuangan atau wakilnya & Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan. CPMU bersama dengan konsultan melaksanakan survei dasar terhadap masyarakat yang akan menerima manfaat.

Hibah yang diterima Pemda harus memberi penyertaan modal ke PDAM yang digunakan sebagai biaya pemasangan sambungan rumah (SR) yang menjadi persyaratan hibah. Perusahaan Daerah Air Minum segera memulai pembangunan dengan pihak ketiga yang dilibatkan atau memanfaatkan mekanisme lainnya yang sesuai.

Setelah pekerjaan telah selesai barulah calon pelanggan dapat mengajukan permohonan penilaian CPMU. Permintaan tersebut akan diteruskan ke PPMU dengan syarat bahwa nilai dana hibah tidak melebihi anggaran APBD yang telah ditetapkan dan jumlah sambungan rumah (SR) sesuai dengan dokumen Pelaksanaan Hibah Dana (PHD).

Selanjutnya dilakukan verifikasi evaluasi kelayakan pemasangan sambungan rumah (SR) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dilakukan dengan baik dan berfungsi optimal sesuai standar teknis yang berlaku. Kepuasan pelanggan penerima SR dalam Program Hibah Air Minum juga dipertimbangkan. Jika kondisi pemasangan SR dan standar teknis sesuai dengan harapan, atau jika tidak sesuai, CPMU dan PPMU akan merekomendasikan peningkatan kualitas pekerjaan dan pelayanan kepada PIU, sehingga persyaratan dapat terpenuhi dan diajukan kembali pada tahapan berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada PPMU oleh BPKP Perwakilan yang digunakan untuk setiap kabupaten/kota, dengan salinan untuk BPKP Pusat serta CPMU.

Surat Laporan dan Rekomendasi Hasil Verifikasi yang kemudian dikeluarkan oleh PPMU berdasar pada laporan verifikasi oleh konsultan dan BPKP. Berdasarkan surat rekomendasi dari PPMU, CPMU akan mengirimkan surat rekomendasi teknis pencairan dana hibah kepada DJPK atas nama Dirjen Cipta Karya.

Dirjen Perimbangan Keuangan & Kemenkeu akan mengevaluasi dan mencairkan dana hibah setelah menilai dokumen administratif persyaratan. Program ini harus berlangsung di satu tahun anggaran dan diharapkan tiap daerah melaksanakan program secara

bersamaan untuk memungkinkan penggantian dana dari pemerintah pusat.

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah

Untuk turut serta dalam program bantuan hibah untuk penyediaan air minum di perkotaan, Pemerintah Daerah yang akan berpartisipasi untuk mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan:

1. Adanya BUMD pengelola SPAM (mengacu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 mengenai Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (BUMD));
2. Memiliki kapasitas menganggur (idle capacity);
3. Memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai Partisipasi Keuangan dari Pemerintah Daerah dalam Bentuk Penyertaan Modal yang masih berlaku;
4. Harus mengajukan daftar yang mencakup setidaknya 500 sambungan rumah (SR) bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpotensi menerima manfaat setelah dilaksanakan penilaian kinerja;
5. Memberikan prioritas kepada Kabupaten/Kota dalam intervensi untuk mengatasi masalah anak dengan pertumbuhan terhambat (Stunting).

Kriteria Masyarakat Peserta MBR

Kriteria peserta:

1. Calon pelanggan yang mengajukan memiliki daya listrik rumah tidak lebih dari 1.300 VA atau tidak memiliki sambungan listrik;
2. Memenuhi syarat menjadi pengguna jasa PDAM
3. Tidak keberatan untuk membayar biaya pasang SR sesuai dengan yang ditetapkan dengan ketentuan jumlah biaya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
4. Rumah calon pelanggan haruslah berada di wilayah administrasi daerah peserta program, tidak terletak di wilayah administrasi daerah lain lain.
5. Belum pernah terdaftar sebagai penerima manfaat program sejenis.
6. Hanya untuk pemakaian rumah tangga, tidak diperuntukan bagi fasilitas sosial maupun fasilitas umum.

Kriteria Teknis Sambungan Baru

Harus dalam kurun waktu setelah surat penetapan pemberian hibah dari kementerian keuangan serta telah usai dilakukan baseline survey. Pemasangan SR baru dapat dilakukan. SR wajib berstandar teknis Norma, Standar, Petunjuk, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Besaran dan Peruntukan Dana Hibah

Dana Hibah untuk program hibah air minum telah diatur Pemerintah Pusat. Rincian ketentuan tersebut seperti dibawah ini :

Besaran dana hibah

Dana hibah hanya diperuntukan pada tiap SR yang telah dibangun dan berfungsi baik, nilai dana hibah diberikan secara progresif dengan rincian:

Untuk Pemda penerima hibah baru :

- 1) kurang dari 1.000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR
- 2) 1.001 SR hingga seterusnya : Rp. 3.000.000,-/SR

Untuk Pemda yang telah mengikuti program hibah air minum bantuan dari pemerintah Australia tahap kedua atau program hibah air minum APBN :

- 1) ≤ 1.000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR (kumulatif s/d 1.000 SR).
- 2) ≥ 1.000 SR : Rp. 3.000.000,-/SR

Dana hibah yang diberikan ke Pemda maksimal sebesar APBD yang digunakan dalam pelaksanaan program ini sesuai dengan besaran tercantum dalam Perjanjian Hibah Daerah.

Peruntukan Dana Hibah

- 1) Dana Hibah yang diberikan adalah sebagai pengganti atas investasi Pemda melalui PMP daerah pada PDAM dalam rangka pembangunan SPAM perpipaan, dimana merupakan pembangunan infrastruktur air minum hingga penerima manfaat program mendapatkan pelayanan air minum.
- 2) Dana Hibah tidak diperuntukan sebagai pengganti biaya pasang SR, sehingga pihak pelaksana seperti PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan sesuai kebijakan dan aturan berlaku di masing masing kabupaten atau kota.
- 3) Dana Hibah yang diterima Pemda diharapkan dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana terkait air minum seperti tercantum dalam APBD daerah masing masing, berupa dana PMP daerah kepada PDAM lewat organisasi perangkat daerah terkait.

Kendala dalam pelaksanaan program

Dalam pelaksanaan program MBR, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

- a) Kendala pertama, tersebut berupa kendala teknis dan kendala yang berasal dari calon pelanggan MBR. Kendala tersebut antara lain Perubahan konstruksi pemasangan dari meter vertikal ke meter horizontal berpengaruh dengan proses pasang meter khususnya lokasi persil yang di gang sempit sehingga mengganggu akses jalan umum dan diperlukan ijin ke pemangku wilayah. Sebelumnya meteran air pelanggan Perumda Tugu Tirta merupakan meteran vertikal, namun untuk saat ini sedikit demi sedikit meteran pelanggan diganti dengan meteran horizontal. Begitu

juga dengan meteran yang dipasang di rumah calon pelanggan MBR ini, meteran yang dipasang adalah meteran horizontal karena itu terdapat kendala petugas pemasangan yang belum terbiasa dengan pemasangan meteran horizontal. Petugas pemasangan membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan ini.

- b) Kendala yang kedua adalah waktu pemasangan meter yang sangat terbatas yaitu paling lambat tanggal 30 September 2022, sementara SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) pemasangan Perumda Tugu Tirta baru akan terbit akhir bulan Juli 2022, membuat Perumda Tugu Tirta tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memasang SR (Sambungan Rumah) di seluruh calon pelanggan MBR. Hal ini bertentangan dengan tahap pelaksanaan yang telah penulis jabarkan diatas, bahwa poin keempat belas menyatakan bahwa program hibah hanya berlangsung dalam satu tahun anggaran, maka harus dipastikan bahwa tiap daerah telah melakukan seluruh realisasi program dalam tahun yang sama, supaya penggantian dana oleh pemerintah pusat terlaksana. Namun meskipun batas waktu telah terlewat, pihak Perumda Air Minum Tugu Tirta tetap melaksanakan pemasangan SR, Sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 yang sudah terpasang sebanyak 1.083 SR dan masih akan terus melakukan pemasangan hingga semua SR calon pelanggan MBR terpasang sesuai jumlah pengajuan yang lolos verifikasi.
- c) Kendala ketiga adalah adanya calon pelanggan MBR yang mengundurkan diri sebanyak 7 orang dari jumlah total calon pelanggan yang lolos verifikasi Kementerian PUPR, alasan calon pelanggan mengundurkan diri adalah keberatan dengan biaya tambahan jaringan. Sehingga pihak Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang harus melakukan pengembalian dana dan merubah kembali urutan pasang SR calon pelanggan MBR yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bagian bagian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Hibah Air Minum 2024 di Perumda Tugu Tirta Kota Malang berjalan dengan baik karena sesuai dengan tujuan awal program hibah air minum 2024 yaitu mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) mengenai target universal seratus persen air minum aman bagi masyarakat.
2. Program pasang baru bagi MBR di Perumda Tugu Tirta Kota Malang memberikan keringanan kepada calon pelanggan MBR dibuktikan dengan perbedaan tarif yang

cukup signifikan jika dibandingkan dengan pasang reguler, ditambah lagi dengan adanya penggratisan biaya tambahan jaringan maksimal 30 meter. Selain itu pembayaran juga bisa dicicil sebanyak maksimal tiga kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program MBR ini memberikan kemudahan bagi penerima manfaat yaitu calon pelanggan MBR.

3. Meskipun pelaksanaan program hibah seharusnya dalam kurun waktu satu tahun anggaran, namun pemasangan SR di Perumda Tugu Tirta Kota Malang belum selesai dalam satu tahun anggaran. Namun Perumda Tugu Tirta Kota Malang tetap berkomitmen memasang seluruh SR di calon pelanggan MBR yang sudah melakukan pembayaran.
4. Adanya perubahan bentuk meteran dari vertikal ke horizontal, dibutuhkan proses adaptasi oleh petugas pemasangan meteran Perumda Tugu Tirta Kota Malang yang menyebabkan kendala.
5. Meskipun program MBR telah memberikan banyak keringanan kepada calon pelanggan MBR, masih terdapat calon pelanggan yang merasa keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan. Sehingga pihak Perumda Tugu Tirta Kota Malang melakukan pengembalian dana yang telah dibayar sejak awal.

REFERENSI

- Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2014). *IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN AIR (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2133–2138.
- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anonim. (2022). Laporan Final MBR 2022 Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang 2022.
- Annisa, Febry. (2022) Strategi Pemasaran Program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pada PDAM Kota Padang. Skripsi thesis, Fakultas Ekonomi.
- Anwar Romdloni. (2022) Penerapan Manajemen Aset dan Internet of Things (IoT) dalam Pengendalian Kehilangan Air Minum (Studi Kasus PDAM Kota Malang).
- Dewi Shanty, Rachmawati S DJ. (2020). *Ketercapaian Sasaran 4K dalam Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di PDAM Tirta Dharma Kota Malang*
- Farrel Baihaqi. (2023). *Sekilas Tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta, PDAM Kota Malang Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 174-191.
- Kfmpekalongan. (2022). *Layani Kebutuhan Air Bersih, PDAM Tirta Kajen kembali Buka SR MBR Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *Jurnal PubBis*, 2(2), 218–231
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING

POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Mirani, Dwi and Prabujaya, Sena Putra. (2016) *Efektivitas Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Palembang Tahun 2015*. *Jurnal Administrasi Negara*, VII (2). pp. 142-160

Novianti, S., & Sulistyorini, L. (2022). *Gambaran Pengolahan Air Baku menjadi Air Minum di Sumur PDAM X*. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(4), 921–928.

Pokja PPAS Nasional. (2021). *Bimtek Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Dorong Pemenuhan Akses Air Minum Aman*.

Puri, D. K., Hanafi, I., Prasetyo, W. Y., Publik, J. A., Sugianor, & Budiman, A. (2018).

Randy Mahardhika Putra. (2013). *IMPLEMENTASI PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA KOTA SAMARINDA*. (2020).